

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1.1 Teori Kontinjensi

Perkembangan terbaru penelitian teori kontinjensi termasuk apa yang dikenal sebagai pendekatan “sistem” pendekatan sistem holistik mempertimbangan beberapa efek kontinjensi dan mungkin saling bertentangan pada kinerja unit kerja dalam rangka mempromosikan pemahaman yang lebih lengkap dari desain unit-kerja otley (1980) menyatakan tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut bergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi. (Silviani, 2014).

Teori ini tepat untuk menjelaskan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dengan Kualitas laporan keuangan daerah. Dimana teknologi dan sistem akuntansi saling berkaitan erat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka diperlukan teknologi sistem akuntansi untuk menunjang SDM dalam membuat laporan keuangan.

1.2 *Decision Usefulness Theory*

Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari teori normatif. Teori kegunaan keputusan (*Decision Usefulness Theory*) dari informasi akuntansi dikemukakan dalam disertasi Staubus untuk pertama kalinya

Georje pada tahun (1954). Pendekatan model keputusan ditunjukkan untuk mengambil informasi apa yang diperlukan untuk membuat keputusan. Teori kegunaan keputusan mencakup syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen- komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Premis dari teori kegunaan- keputusan adalah : tujuan akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan mengenai organisasi guna pengambilan keputusan ; tujuan akuntansi dikaitkan dengan *stakeholder* adalah menyediakan informasi keuangan mengenai suatu organisasi yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan. Sikap manajemen terhadap penerapan standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan keputusan informasi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.(Silviani,2014).

Pengelompokan *user* dalam konsep *decision usefulness* terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok masyarakat, kelompok legislatif dan kelompok dewan pengawas. Kelompok masyarakat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi koefisien dan keefektifan kegiatan

yang dilakukan pemerintah, membandingkan hasil program yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, menaksir operasional keuangan dan kondisi keuangan, dan untuk menentukan terlaksananya anggaran yang dibuat. Kelompok dewan pengawas menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi pendanaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh eksekutif, membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi anggaran yang terjadi, pengawasan aktivitas dana dan posisi keuangan untuk menganalisis keseimbangan dana. (Silviana, 2014)

Decision Usefull Theory tepat untuk menjelaskan penelitian tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah dimana diperlukan SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengambil keputusan, dan tepat untuk menjelaskan pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan dimana laporan keuangan pemerintah untuk menaksir operasional keuangan dan kondisi keuangan, dan untuk menentukan terlaksananya anggaran yang dibuat, mengevaluasi pendanaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh eksekutif, membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi anggaran yang terjadi, pengawasan aktivitas dana dan posisi keuangan untuk menganalisis keseimbangan dana.

1.3 Kualitas Laporan Keuangan daerah

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya,(SAP,2010:245). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.(Utama,2017).

Berdasarkan peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan struktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No.8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010:KK-10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan,andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, bebas dari

pengertian yang menyesatkan ,dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode- periode sebelumnya. (Diani,2014).

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masalah atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

b. Andal

Informasi dalam Laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat Dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. (Diani,2017)

Namun menurut mulyana (2010:96) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis ketidak sesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Selanjutnya Mahmudi (2003:77) mengungkapkan bahwa laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok meliputi ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Menurut Permendagri No 13/2006, ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Nagor,dkk:2015).

Namun menurut Mokoginta dkk(2017) menyatakan bahwa laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu

ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No. 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan ketrampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang harus disepakati. Hutapea dan Thoha (2008:4) ada beberapa definisi kompetensi yaitu:

1. Boyatzis (1982)

Kompetensi didefinisikan sebagai “kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.

2. Woodruffe (1991) and Woodruffe (1990)

Mereka membedakan antara pengertian *competence* dan *competency* yang mana *competence* diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu menunjukkan “wilayah kerja dimana orang dapat menjadi kompeten atau unggul”, sedangkan *competency* merupakan konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu menunjukkan “dimensi perilaku yang melandasi prestasi unggul (*competent*)”. (Andini dan Yusrwati,2015).

Karakteristik Kompetensi

Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, seleksi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM. Hutapea dan Thoah (2008:28). Mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan dan perilaku individu.

1. Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat.

2. Ketrampilan (*Skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.
3. Sikap (*Attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Andini dan Yusrawati,2015).

Menurut tjiptoherijanto (2001) untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi,dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskriptif jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskriptif jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam bertugas (Ariesta,2013)

Namun menurut Reno Julia Utama(2017) kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan

dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomers). Kompetensi dapat dilihat dari (1). Latar belakang pendidikan, (2). Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, (3). Dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Indikator kompetensi sumber daya manusia diukur dengan

- a. Latar belakang pendidikan.
- b. Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti.
- c. Ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas

1.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi

Teknologi informasi akuntansi adalah teknologi yang digunakan dalam proses mengolah hingga menyapaikan informasi akuntansi. Peningkatan pengguna teknologi komputer sebagai salah satu bentuk pengembangan teknologi informasi akuntansi telah banyak mengubah pemrosesan data akuntansi secara manual menjadi otomatis. Otomatisasi teknologi informasi akuntansi yang berdasarkan pada komputer dapat melakukan berbagai fungsi secara cepat dan tepat. Teknologi informasi akuntansi dalam perusahaan akan membantu menyediakan informasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan manajer dalam pengambilan keputusan, selain itu teknologi informasi akuntansi tidak hanya digunakan dalam pengolahan data, namun juga dapat digunakan untuk

mengetahui lebih cepat jika timbul permasalahan dalam organisasi dan memfokuskan pada sumber tertentu guna mengambil tindakan yang tepat (Budiarti,dkk,2015).

Teknologi informasi yang tersaji didalam pelaporan keuangan pemerintahan digunakan oleh berbagai macam pengguna.(Mardiasmo,2006) mengidentifikasi sepuluh pemakai pelaporan keuangan pemerintah, yaitu (1). Pembayar Pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grators*), (3)investor dan kreditor, (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) karyawan/pegawai ,(6) pemasok (*vendors*),(7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (*voters*), (10) badan pengawas (*oversight bodiest*).

SIA merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan (Bodmar &Hopwood,2007). Barry (2003) modal dalam organisasi, sedangkan Ronney &Paul (2004) menyatakan sistem informasi akuntansi merupakan serangkaian dari satu atau lebih komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur ,dan teknologi informasi.(Silviana,2014).

Namun menurut Sapitri dkk (2015) sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan, membantu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah

yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan dimanfaatkannya teknologi, informasi yang didapatkan diharapkan dapat membantu pihak yang berkepentingan dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah dan mengevaluasinya, sehingga informasi yang didapatkan haruslah sebuah informasi yang didapatkan haruslah informasi yang berkualitas. Sistem informasi dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (*timely*), akurat (*accurate*), dan dapat dipercaya (*reliable*) (widjajanto,2001). Dengan memanfaatkan teknologi, informasi keuangan menjadi berkualitas, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan.

Indikator untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi akuntansi adalah

- a. Sumber daya personalia/ pelaksana peralatan dan aturan hukum
- b. Tugas
- c. Tujuan.

1.6. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No.17,2003). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya

maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No.13,2006).

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan. Kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan efektif serta efisien maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung bukti-bukti yang kuat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah.

Suatu pengelolaan berkaitan erat dengan pengendalian internal, sistem pengendalian yang lemah akan mempengaruhi pendapat audit dalam laporan keuangan (Nugraheni & Subaweh, 2008). Salah satu bagian didalam pengendalian

intern adalah informasi dan komunikasi serta pemantauan, didalam instansi tertentu memerlukan informasi komunikasi apalagi pemantauan agar menjalankan pengelolaan organisasi terutama keuangan akan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan.(Herawati,2014). Menjelaskan bahwa informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian maka komunikasi dan pemantauan merupakan proses dari pencapaian suatu pengelolaan yang baik. Implementasi pedoman pengelolaan keuangan yang diikuti dengan pemahan yang baik dari sesame pegawai yang terlibat akan mampu melahirkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (Charolina&Abdullah,2013).

Menurut Chabib Sholeh (2010:10) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang,

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak.

2. *Value for money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kehidupan demokratis yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. Yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian dimasa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat. transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mencakup administrasi keuangan yang mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan keuangan daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi dan dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup kekurangan penerimaan kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Prinsip pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan pengelolaan keuangan daerah dan harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujura yang tinggi terhadap mandat yang telah diberikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat serta dapat dibandingkan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dan dicapai.(Defitri,2018).

Implementasi pengelolaan keuangan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kaitan pengelolaan keuangan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang berada dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yaitu keputusan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/Tahun 2011 terhadap pedoman pengelolaan keuangan komisi pemilihan Umum. Pelaksanaan pengelolaan keuangan khusus dilingkungan KPU merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, pendapatan dan pengesahan anggaran oleh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. (Charolina&Abdullah,2013).

Namun menurut Sholikah (2016) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah.

Indikator pengelolaan keuangan daerah diukur berdasarkan :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pertanggungjawaban
- e. Pemeriksaan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang saya lakukan ini diperoleh dari buku dan beberapa penelitian sebelumnya, yang dapat memberikan informasi, penambah wawasan, dan gambaran tentang bahan materi yang saya perlukan. Berikut beberapa tabel penelitian terdahulu pada tabel 2.1 sebagai berikut:

No	Penulis& Tahun	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
1	Erma Setiawati & Shinta Permatasari (2014)	Sumber Daya Manusia (X_1), Pengendalian Intern (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3), dan Pemahaman Akuntansi (X_4)	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah 2) Pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. 3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah 4) Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2	Emilda Ihsanti (2014)	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) Penerapan SAKD (X_2)	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh

				<p>positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah</p> <p>2.) Penerapan SAKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</p>
3	As Syifa Nurillah Dul Muid (2014)	<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)</p> <p>Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (X_2)</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)</p> <p>Sistem Pengendalian Intern (X_4)</p>	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	<p>1) Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</p> <p>2) Penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</p> <p>3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah</p> <p>4) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</p>
4	Fadhilah Husna (2013)	<p>Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1)</p> <p>Pengawasan Keuangan (X_2)</p> <p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_3)</p>	Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Y)	<p>1) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah.</p>

)		<p>2) Pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah.</p> <p>3) Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah.</p>
5	Ida Ayu Enny Kiranayanti & Ni Made Adi Erawati (2016)	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) Sistem Pengendalian Intern (X_2) Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (X_3)	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	<p>1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</p> <p>2) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</p> <p>3) Pemahaman atas regulasi sitem akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</p>
6	Akhmad Syarifudin (2014)	Kompetensi Sumber Daya	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	1) Kompetensi sumber daya

		Manusia (X_1) Peran Auditor Internal (X_2) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_3)	Daerah (Y)	manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah 2) Peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 3) SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
7	Zega Budiarti, Siti Nurlaela dan Endang Masitoh W (2015)	Sumber Daya Manusia (X_1) Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi (X_2)	Kinerja Pelaporan Keuangan (Y)	1) Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pelaporan keuangan. 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaporan keuangan.
8	M. Rico Rampaty, Dwi Cahyono, dan Didik Eko Pramono (2014)	Sumber Daya Manusia (X_1) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) Sistem Pengendalian Intern (X_3)	Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1) Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas

				informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
9	Dian Irma Diani (2014)	Pemahaman Akuntansi (X_1) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) Peran Internal Audit (X_3)	Kualitas Laporan keuangan (Y)	1) Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 3) Peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
10	Teuku Fahrian Nagor, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2015)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern (X_1) Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh (Y)	1) Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat. 2) Penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh

				positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat.
11	Siska Yulia Defitri (2018)	Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1) Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
12	Ovita Charolina & HUsaini Abdullah	Implementasi Pengelolaan Keuangan (X_1) Pengalaman Kerja (X_2)	Kualitas Laporan Keuangan KPU (Y)	1) Implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU. 2) Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU.
13	Ni made Trisna Sapitri I Gst Ayu Purnamawati, Edy Sujana (2015)	Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1) Pengendalian Internal Akuntansi (X_2) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1) Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2) Pengendalian internal akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

				3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
14	Dewi Andini & Yusrawati (2015)	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	1) Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 2) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
15	Reno Julia Utama (2017)	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) Sistem Pengendalian Intern (X_4)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap

				kaualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
16	Fadila Ariesta (2013)	Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1). Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2). Pengendalian Intern Akuntansi (X_3)	Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	<p>1) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3) Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p>

C. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu

memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi. Oleh sebab itu mereka menyadarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dan daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan beberapa peraturan pemerintah (PP) menyangkut pengelolaan keuangan daerah diantaranya, PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam PP No.71 tahun 2010 tentang SAP.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam SAP terdapat empat persyaratan karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami. Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP sangat menentukan kualitas LKPD. Dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBD, tiap kepala SKPD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya. Pencatatan dalam proses akuntansi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD,

yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran (SAL), Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Entitas (LPE) Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan dari tiap-tiap SKPD tersebut dikonsolidasikan oleh DPPKAD menjadi LKPD.(Syarifudin,2014).

Kompetensi sumber daya manusia menurut (Ihsanti,2014) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Hasil penelitian Utama(2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut Utama(2017) teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer

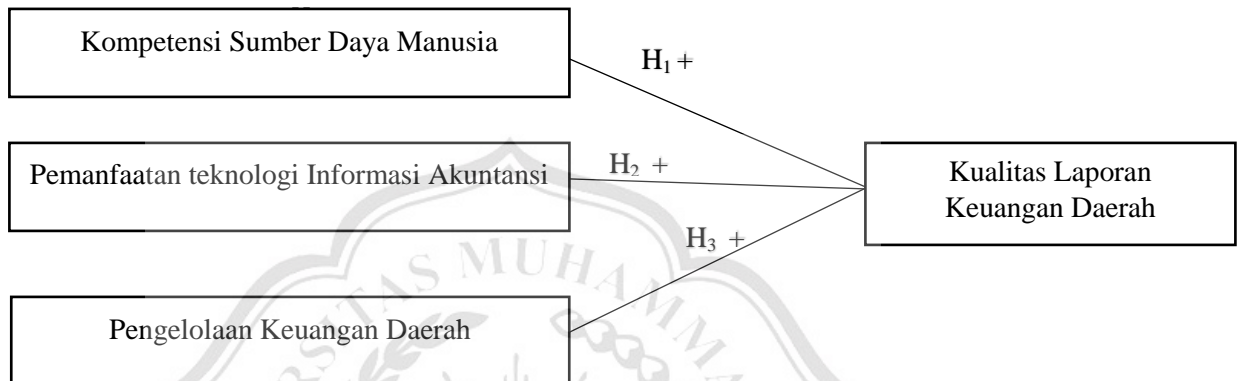
untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Hasil penelitian Budiarti,dkk(2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut Sholikhah,dkk (2016) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar, meliputi perencanaan(termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD atau penganggaran), penatausahaan (mproses pelaksanaan APBD) dan Pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi ini merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran/ pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Hasil penelitian Nagor,dkk(2015) menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan tinjauan penelitian yang dilakukan, maka variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi, dan pengelolaan

keuangan daerah. Berdasarkan hubungan variabel tersebut maka skema kerangka penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.2



Kerangka pemikiran di atas menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah dapat dirumuskan hipotesis sementara dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil penelitian Ihsanti(2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian,jika kompetensi SDM bagian keuangan/ akuntansi pada SKPD Kab. Lima puluh Kota baik, dalam artian SDM keuangan/ akuntansi tersebut kompeten, maka kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota lebih baik. Ini juga disertai dengan ketrampilan,pengetahuan, dan

kemampuan yang dimiliki oleh responden dalam membuat laporan keuangan. Selain itu pengalaman kerja dan pelatihan yang dimiliki oleh seorang pegawai pada SKPD Kab. Lima puluh Kota bisa mempengaruhi kualitas Sumber daya Manusia.

Decision Usefull Theory menyatakan semakin baik sumber daya manusia yang kompeten maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas guna pengambilan keputusan para pemakai. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka hipotesisnya adalah:

H_1 = Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian Diani(2014) untuk menyajikan laporan keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk penyampaian dan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Sistem informasi akuntansi keuangan

daerah sebagai suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Jika kualitas sistem informasi berjalan dengan baik, maka semua proses akan berjalan dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik.

Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada semua laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunan. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Kesesuaian (*fit*) yang lebih baik antara sistem pengawasan dengan variabel kontinjensi menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat. Berdasarkan pada teori kontinjensi, dapat diartikan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, sistem pengelolaan keuangan daerah, tergantung pada kondisi pemda yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka hipotesisnya adalah:

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil Penelitian Nagor,dkk(2015) prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Aceh Barat. Secara umum, menunjukkan bahwa penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah telah diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Walaupun penerapannya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan BPK Tahun 2012, dimana masih terdapat beberapa kelemahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,kecurangan serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan.

Decision Usefull Theory menjelaskan laporan keuangan pemerintah untuk menaksir operasional keuangan dan kondisi keuangan, dan untuk menentukan terlaksananya anggarannya yang dibuat, mengevaluasi pendanaan dan pengeluaran yang dilakukan eksekutif membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi anggaran yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka hipotesisnya adalah :

H₃ :Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.